

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan oleh karena itu maka perlu adanya kerjasama antar negara untuk dapat saling membantu menutupi kekurangan dan menyalurkan kelebihannya, di mana kerjasama ini disebut dengan kerjasama internasional. Adapun kerjasama internasional adalah hubungan kerjasama antara dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan ini harus saling menguntungkan bagi semua pihak dan mempunyai tujuan sebagai berikut memenuhi kebutuhan setiap warga negara, menghindari dan mencegah konflik, memperoleh pengakuan kemerdekaan, memperkuat hubungan antar bangsa di berbagai bidang, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menemukan dan mengembangkan potensi masing-masing bangsa, pengentasan kemiskinan, dan memajukan perdagangan dengan meningkatkan kesejahteraan negara-negara peserta (Nasution, 2021).

Saat ini Indonesia masih berada di era revolusi industri 4.0 dan sedang mengalami tahap pengembangan dan perdebatan untuk menuju era *society 5.0*. Di mana secara umum mengacu terhadap perkembangan teknologi yang terus meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam ekonomi industri serta sektor produksi. Sebagai penyempurnaan era 4.0 adanya teknologi seperti *AI* yang mendorong efisiensi serta produktivitas. Berkat adanya revolusi industri ini ditandai dengan berkembangnya inovasi-inovasi di bidang teknologi yang secara berkala

dan terus-menerus diperbarui dengan melihat peluang untuk membangkitkan gairah perekonomian. (Sriekaningsih, A.,2020).

Menurut data survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa pada tahun 2018 terdapat 171,17 juta (64,8%) pengguna internet di Indonesia dari 264,161 juta jumlah penduduk Indonesia. Data survei APJII 2018 mengungkapkan juga bahwa salah satu perangkat yang sering digunakan untuk terhubung dengan internet adalah smartphone, sebesar 93,9% setiap hari digunakan. Dengan berkembangnya penggunaan internet melalui smartphone, membuat instrumen pembayaran non tunai yang berbasis server lebih banyak digunakan di masyarakat. Data Bank Indonesia pada Maret 2020, ada sebanyak 40 perusahaan telah menerbitkan uang elektronik server.

Selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan persentase pekerja di tujuh sektor prioritas program Making Indonesia 4.0. Persentase ini sebesar 5,02% pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 5,70% pada tahun 2023. Peningkatan data ini, tentu saja, memberikan harapan bahwa penerapan teknologi di tujuh sektor prioritas akan meningkatkan kapasitas perekonomian negara. Gaya hidup sebagian besar masyarakat baik global maupun di Indonesia telah berubah akibat kemajuan teknologi informasi. Saat ini, orang-orang semakin cenderung menggunakan ponsel pintar dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan di era digital saat ini menjadi salah satu kemudahannya. Aljufri, M. L. (2019). Era global memaksa

masyarakat untuk terus mengembangkan teknologi yang memudahkan bahkan menggantikan sepenuhnya tenaga manusia, khususnya di bidang keuangan. Kemajuan teknologi sistem pembayaran saat ini dibarengi dengan pesatnya pertumbuhan jumlah alat pembayaran. Teknologi modern semakin banyak digunakan untuk pembayaran nontunai baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan ini dibarengi dengan sejumlah inovasi yang menjadikan teknologi lebih efektif, aman, cepat, dan nyaman.

Oleh karena itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, suatu negara harus menjalani revolusi pembangunan agar nantinya meningkatkan kesejahteraan warganya dan mempersempit kesenjangan ekonomi. Adapun Asia Tenggara merupakan kawasan di benua Asia dengan jumlah penduduk lebih dari 668 juta jiwa yang terbagi di 11 negara anggota ASEAN dimana negara-negara Asia Tenggara, sebagian besar merupakan sebuah negara yang sedang memajukan proses perekonomiannya. Seperti masih banyak negara yang infrastrukturnya belum memadai sehingga menyebabkan stagnasi perekonomian di sejumlah negara. (Bani Rachmad & Raharjo, 2023).

Adapun setiap negara-negara anggota ASEAN dan warganya harus bekerja keras dan menjalani sinergi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, khususnya dengan meningkatkan ketahanan nasional dan mengubah struktur perekonomian. Pada KTT Oktober 2003 di Bali, dua belas poin Komunitas Keamanan ASEAN, lima poin Masyarakat Ekonomi ASEAN (Community Economy, MEA), dan enam poin Komunitas Sosial Budaya ASEAN menyoroti tiga kerangka mendasar untuk mencapai komunitas ASEAN. MEA, sebagaimana

didefinisikan dalam Visi ASEAN 2020, adalah jenis penyatuan ekonomi yang ditandai dengan investasi, perdagangan bebas barang dan jasa, pembangunan ekonomi yang adil, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi. Selain itu, melalui MEA, kepentingan dan upaya untuk menyatukan perekonomian berdasarkan inisiatif yang ada dan direncanakan berdasarkan standar waktu yang tepat dapat diselaraskan. (Hardiyanto et al., 2015).

Agar semua negara anggota MEA dapat berkembang secara bersamaan, liberalisasi dan kerjasama yang saling menguntungkan harus dilaksanakan. Hal ini memerlukan pengembangan dan kerjasama teknis. Oleh karena itu, mengingat persyaratan pendidikan yang disebutkan di atas, keterlibatan pembangunan diperlukan di bidang sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, konsultasi kebijakan yang lebih hati-hati di bidang keuangan dan makroekonomi, pelaksanaan transaksi keuangan, peningkatan infrastruktur dan distribusi komunikasi, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, membawa menyatukan industri untuk memanfaatkan sumber daya regional, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta. (Darnilawati., D. 2018).

Meninjau kembali masyarakat ekonomi ASEAN yang memprioritaskan perdagangan internasional sebagai sumber pendapatan, oleh karena itu wajib bagi pemerintah setiap negara anggota ASEAN untuk mendorong masyarakat agar memperdalam pasar keuangan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses produk keuangan untuk rumah tangga dan memfasilitasi keuangan sesuai dengan kesepakatan MEA yang menjadi 4 pilar pada *blueprint* yakni ;

1. Menuju *Single market and production based*, yakni arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal.
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*Regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM).
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan ukm dan program – program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*.
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network* ) (Pramudyo, 2015).

Di bidang-bidang seperti meningkatkan standardisasi dan menciptakan infrastruktur penyelesaian untuk perdagangan lintas batas, pengiriman uang, sistem pembayaran ritel, dan pasar modal, sistem penyelesaian dan pembayaran akan diperkuat. Hal ini akan mendorong pengembangan sistem pembayaran yang aman, efektif, dan kompetitif serta konektivitas regional yang lebih baik. Untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi baik di dalam maupun di luar kawasan, sejumlah standardisasi praktik pasar dan standar berdasarkan praktik terbaik global (seperti ISO 20022) juga diperlukan. Oleh karena itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia (BNM), *Bangkok Sentral ng Pilipinas (BSP)*, *Monetary Authority of Singapore (MAS)*, dan *Bank of Thailand (BOT)* dalam upaya mempererat hubungan lintas negara sistem pembayaran perbatasan. (Haryono, 2023)

Konektivitas sistem pembayaran sangat penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan mendorong investasi dan perdagangan. Negara-negara anggota ASEAN dapat memfasilitasi transaksi lintas batas, menarik investasi asing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur sistem pembayaran yang lancar. Sebagai langkah besar, Bank Indonesia dan bank sentral Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Konektivitas Pembayaran Regional (RPC). Komitmen kelima negara ASEAN untuk mendorong integrasi ekonomi dan kerjasama yang lebih mendalam ditunjukkan melalui perjanjian bersejarah ini. (Negeri & Indonesia, n.d.)

Melalui strategi dan efektivitas Proyek Nexus, Bank Sentral ini juga bekerjasama dengan lembaga keuangan internasional, khususnya Bank International Settlements, untuk membangun konektivitas pembayaran cepat berbasis pembayaran di wilayah tersebut. Kelima bank sentral tersebut menandatangani Nota Kesepahaman (NK) tentang Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Daerah pada 14 November 2022, dan kerjasama ini juga merupakan perpanjangan dari perjanjian tersebut. (Haryono Erwin, 2023).

Proyek Nexus merupakan proyek yang dirancang untuk menstandarisasi cara sistem ini terhubung satu sama lain. Daripada operator sistem pembayaran membuat koneksi khusus untuk setiap negara baru yang terhubung, operator dapat membuat satu koneksi ke platform Nexus. Koneksi tunggal ini memungkinkan sistem pembayaran cepat menjangkau semua negara lain dalam jaringan. Nexus dapat secara signifikan mempercepat pertumbuhan pembayaran lintas negara secara

instan. Proyek Nexus dimulai sebagai studi yang dilakukan oleh BIS untuk menerapkan rencana multilateral untuk menghubungkan sistem pembayaran cepat berbasis pembayaran di berbagai negara (Tahap I Proyek Nexus). Selain itu, BIS melakukan penelitian teknis dan pengujian konektivitas pembayaran berbasis pembayaran cepat (Proyek Nexus Tahap II) bekerjasama dengan BNM, MAS, dan Banca d'Italia. Proyek Nexus Tahap III akan melibatkan BI, BIS, BNM, BSP, MAS, dan BOT untuk melakukan studi ekstensif mengenai kemungkinan konektivitas pembayaran berbasis pembayaran yang cepat. Studi ini akan mencakup struktur organisasi dan tata kelola, model bisnis dan adopsi komersial, teknologi, dan operasi. Tahap III sebenarnya dijadwalkan dilaksanakan antara April 2023 hingga Maret 2024. (Settlement, 2019).

Selanjutnya adalah mengenai wilayah Kepulauan Riau, Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia. Tahun 2020, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km<sup>2</sup>, dan 58% penduduknya berada di kota Batam. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km<sup>2</sup>, sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan (Kepulauan Riauprov, n.d.). Perekonomian Kepulauan Riau sebagian

besar ditopang oleh ekonomi Kota Batam. Dominasi Kota Batam terhadap perekonomian Kepulauan Riau tidak lepas dari kebijakan Pemerintah yang menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia. Melalui UU No.44 Tahun 2000 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, secara resmi Batam mendapat fasilitas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB/Free Trade Zone), dengan tujuan mendorong pengembangan industri dan investasi. Perkembangan selanjutnya, KPBPB diperluas hingga Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun (KPBPB Batam-Bintan-Karimun) sesuai Peraturan Pemerintah No.46, 47, 48 Tahun 2007. Hingga saat ini, Kota Batam masih menjadi motor utama penggerak perekonomian Kepulauan Riau dengan beberapa pengembangan ekonomi ke arah infrastruktur yang menunjang konektivitas antar pulau. Infrastruktur memegang peranan yang menentukan bagi pengembangan perekonomian dan pembangunan kawasan. Sebagai kawasan yang berada pada posisi strategis diharapkan mampu menjadi salah satu titik pertumbuhan perekonomian, prasarana dan sarana yang dibutuhkan terus mendapat perhatian dari pemerintah (BI.go.id, n.d.).

Oleh karena itu sebagai daerah perbatasan yang sangat strategis sudah tepat untuk melakukan kerjasama konektivitas sistem pembayaran dimana tujuan dari konektivitas sistem pembayaran lintas negara ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mempercepat pemulihan ekonomi. Selain mendorong ekosistem keuangan dan ekonomi regional yang lebih inklusif, penerapan kerjasama konektivitas area pembayaran dapat mendukung dan memfasilitasi perdagangan lintas batas, investasi, pengiriman uang, pariwisata, dan



kegiatan ekonomi lainnya. Secara khusus juga diharapkan bahwa dimulainya kolaborasi ini akan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dengan meningkatkan eksposur dan penetrasi mereka di pasar internasional. Beberapa skema konektivitas sistem pembayaran seperti QR code dan pembayaran cepat masuk dalam kerjasama konektivitas pembayaran regional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian kali ini adalah “Bagaimana strategi dan efektivitas kerjasama lintas Bank Sentral dalam kerjasama sistem pembayaran dikawasan Kepulauan Riau?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dan efektivitas yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dalam kerjasama sistem pembayaran.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, oleh sebab itu, manfaat penelitian ini dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang bagaimana strategi Bank Indonesia Kepulauan Riau dalam kerjasama sistem pembayaran di kawasan.

2. Dapat bermanfaat bagi penerapan disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya dalam meningkatkan wawasan mengenai kerjasama Internasional.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam prakteknya, penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa subjek, diantaranya;

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis untuk mempraktekkan *soft skill* seperti observasi, analisis masalah dan penerapan praktik diplomasi yang sesuai dengan ilmu yang diajarkan dalam kurikulum Hubungan Internasional.

2. Bagi Pemerintah/Instansi Terkait

★ Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pemerintah atau Bank Indonesia dalam mengevaluasi kerjasama sistem pembayaran dikawasan ASEAN.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang Bagaimana kerjasama Bank Indonesia Kepulauan Riau dalam kerjasama sistem pembayaran di kawasan ASEAN.

4. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumber informasi dan informasi pendukung yang dapat bermanfaat bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.